KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

5N9FF7JX

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 5 8 5 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 6 9 7 4 7 1 6 5 4 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : RIZIKUL ELMI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01		6.839.000	6.839.000	0	5	341.950	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 156								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2						2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor	:			Tanggal	dd 📗	mm [ТТТуууу	
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :		L	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	unit Organisasi	· Ī		\Box				
C.4 Tangga	•	` 	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama P	Nama Penandatangan : HARI JUMADI			<u>- • - - </u> 3333				
C.6 Pernyat						benar dan telah saya		
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	c mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	